

PROBLEMATIKA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Yudhistira Ardana, Risa Nur Aulia, Rindy Febriani, Roni Saputra
yudhistiraardana@metrouniv.ac.id, risanuraulia586@gmail.com,
rindyfbri28@gmail.com, ronisaputra7654@gmail.com,

ABSTRAK

Di Indonesia bunga dijadikan sebagai aspek utama dalam mendorong sektor riil, padahal didalam kenyataannya dapat terlihat dengan jelas bahwa bunga akan membuat meningkatnya biaya produksi, sehingga hal yang diharapkan dapat membangun dan mengembang usaha yang dilakukan dengan melakukan peminjaman dengan sistem bunga akan mustahil terwujud. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Indonesia sekarang, ekonomi Islam menawarkan hal lain, jika dalam system perekonomian Indonesia pengembangan usaha dilakukan dengan sistem bunga maka sistem ekonomi Islam menawarkan pola bagi hasil yang tidak akan menimbulkan kenaikan pada biaya produksi, sehingga kemungkinan terjadinya inflasi sangat kecil Pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Problematika sistem perekonomian Indonesia dalam perspektif islam apakah telah sesuai dengan ekonomi dalam Islam. Sehingga nantinya, diharapkan hasil resume penelitian ini dapat dijadikan suatu konsep kerja (framework) atau model bagi para pelaku ekonomi lainnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dimana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui Problematika sistem perekonomian Indonesia dalam perspektif islam, dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan mengambil sumber dari jurnal jurnal dan segala referensi yang mendukung guna kebutuhan penelitian.

Kata Kunci : Sistem ekonomi indonesia, ekonomi islam, problematika

A. INTRODUCTION

Memasuki dekade kedua abad 21 diskursus menyangkut sistem ekonomi masih tetap menarik diperbincangkan, mengingat ternyata begitu banyaknya wajah model ekonomi Indonesia yang diterapkan di lapangan dan tidak konsistennya pilihan prioritas atas sistem ekonomi. Adanya empat pilihan

17

Received : 4 November 2021

Occupation IAIN Metro Lampung, UIN Raden Intan Lampung

E-mail : yudhistiraardana@metrouniv.ac.id, risanuraulia586@gmail.com,
rindyfbri28@gmail.com, ronisaputra7654@gmail.com, heninoviarity@radenintan.ac.id

model yakni neo liberalis (pasar), sosialis, campuran dan ekonomi Islam, yang semua nampaknya menjadi pilihan, menyebabkan negeri ini memiliki beragam wajah ekonomi, yang kesemuanya disadari tidak ada yang sangat murni sebagaimana harapan pesan ideologis masing-masing.

Sistem ekonomi dipahami sebagai kumpulan dari struktur yang terintegrasi dan berfungsi serta beroperasi sebagai suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan (ekonomi) tertentu. Struktur di sini diartikan secara luas sebagai kumpulan dari norma, peraturan atau cara berfikir. Adanya berbagai struktur tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dengan memberikan bentuk atau struktur dasar sebagai pedoman dalam kehidupan sehari - hari. Dalam pengertian struktur ini juga termasuk institusi ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, kekayaan, uang, serikat pekerja, dan lain-lain.

Dalam suatu mekanisme sistem perekonomian, setidaknya terdapat 4 (empat) jenis keputusan yang harus diambil setiap waktu. Keputusan-keputusan tersebut adalah yang berkaitan dengan apa yang akan diproduksi, berapa banyak produksi, bagaimana cara memproduksinya, dan bagaimana alokasi produk tersebut. Bagaimana keputusan tersebut diambil tergantung kepada sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat atau negara tersebut.

B. THEORITICAL

System ekonomi yang terjadi di Indonesia sekarang, ekonomi Islam menawarkan hal lain, jika dalam system perekonomian Indonesia pengembangan usaha dilakukan dengan sistem bunga maka sistem ekonomi Islam menawarkan pola bagi hasil yang tidak akan menimbulkan kenaikan pada biaya produksi, sehingga kemungkinan terjadinya inflasi sangat kecil. Selain itu didalam ekonomi Islam juga diajarkan mindset seseorang menjadi lingkaran atas kesejahteraan orang lain tidak hanya bagi diri sendiri seperti dalam ekonomi Indonesia sekarang. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi :

“Dahulukanlah dirimu, maka bersedekahlah atas dirimu, jika ada sisanya, maka untuk keluargamu, jika masih sisa untuk keluargamu, maka peruntukkanlah bagi kerabatmu yang lain, jika masih ada sisanya lagi, maka demikian dan demikian”.

Didalam perekonomian Indonesia ada sebuah pasar yang memperdagangkan saham, obligasi dan lainnya yang mana pada kenyataannya dalam pasar ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakukan spekulasi dan untung-untungan.

Didalam Islam hal ini dilarang sesuai dengan surat al maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

B. METHODOLOGY

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dimana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui Problematika sistem perekonomian Indonesia dalam perspektif islam, dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan mengambil sumber dari jurnal-jurnal dan segala referensi yang mendukung guna kebutuhan penelitian. Pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Problematika sistem perekonomian Indonesia dalam perspektif islamm apakah telah sesuai dengan ekonomi Islam. Sehingga nantinya, diharapkan hasil resume penelitian ini dapat dijadikan suatu konsep kerja (framework) atau model bagi para pelaku ekonomi lainnya.

D. RESULTS AND DISCUSSION

A. Sistem Ekonomi Indonesia

Secara normatif menurut UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, system ekonomi Indonesia seharusnya condong mengarah pada sosialisme. Oleh Mubyarto, ini diterjemahkan sebagai ekonomi kerakyatan. Ia menggambarkan bahwa pengembangan sistem ekonomi kerakyatan ibarat “perang gerilya”.(Supratikno, 2021). Dimana rakyat berjuang untuk menghadapi konglomerat domestik maupun Internasional. Ekonomi Indonesia yang “sosialistik” sampai 1966 berubah menjadi “kapitalistik” bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama (1959-1966). Selama Orde Baru (1966-1998) system ekonomi dinyatakan didasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pasal 33 UU 1945, tetapi dalam praktek meninggalkan ajaran moral, tidak demokratis, dan tidak adil. (Supriyanto, 2009). Ketidakadilan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari penyimpangan/penyelewengan Pancasila dan asas kekeluargaan telah mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam

yang selanjutnya menjadi salah satu sumber utama krisis moneter tahun 1997.

Menurut ISEI, sistem ekonomi kita menganut paham ekonomi pasar, atau menurut istilah yang digunakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *ekonomi pasar terkendali* (tahun 1990) atau ekonomi pasar terkelola (tahun 1996). Apabila pengertian itu yang akan kita anut, karena datang dari pakar-pakarnya, maka kata kuncinya adalah terkelola (Kartasmita, 1997). Sistem ekonomi pasar yang terkelola dan kendali pengelolaannya adalah nilai-nilai Pancasila Dengan perkataan lain ekonomi Pancasila tentulah harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Menurut ISEI pula di dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak di dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakikatnya masing-masing. Dalam konsep itu, usaha negara berperan sebagai:

- a. perintis di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta;
- b. pengelola dan pengusaha di bidangbidang produksi yang penting bagi negara;
- c. pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- d. imbangannya bagi kekuatan pasar pengusaha swasta;
- e. pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi, dan
- f. penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara.

Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, menjadi populer istilah *Ekonomi Kerakyatan* sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti di RRC (Republik Rakyat Cina), sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal.(Mubyarto, 2004)

Melalui gerakan reformasi banyak kalangan berharap hukum dan moral dapat dijadikan landasan pikir dan landasan kerja. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak pada dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui upaya-upaya dan program-program

pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila, yang diharapkan mampu meredam ekskses kehidupan ekonomi yang liberal.

B. Sistem Perekonomian di Indonesia dengan Perspektif Islam

Jika sistem ekonomi dibiarkan tanpa mengindahkan sistem social (agama, ideology, falsafah), maka akan menimbulkan penolakan yang kuat terhadap penggunaan sistem ekonomi di masyarakat. Dan sebaliknya, jika satu sistem ekonomi dipaksakan dapat merusak tatanan sosial yang ada di masyarakat, meskipun pada awalnya sistem ekonomi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat itu sendiri.(Abd Ghofur, 2010)

Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu ekonomi islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat.(Ghofur, 2016)

Didalam sistim perekonomian dikenal dua kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang pertama ingin mengkaji tentang kebijakan moneter dalam sistem perekonomian di Indonesia. Didalam kebijakan moneter terdapat beberapa aspek salah-satunya adalah tentang bunga.

Di Indonesia bunga dijadikan sebagai aspek utama dalam mendorong sektor riil, padahal didalam kenyataannya dapat terlihat dengan jelas bahwa bunga akan membuat meningkatnya biaya produksi, sehingga hal yang diharapkan dapat membangun dan mengembang usaha yang dilakukan dengan melakukan peminjaman dengan sistem bunga akan mustahil terwujud. Hal ini dikarenakan pelaku ekonomi harus berpikir dua kali dalam pemasaran diantara keinginannya untuk mendapatkan profit dan persaingan pasar. Jika harga barang dinaikan dengan tujuan untuk memperoleh profit maka ditakutkan dia kalah dalam persaingan pasar, dan apabila sebaliknya maka usaha akan merugi atau pun jalan ditempat.(Nazeri, 2016)

Dapat dilihat terdapat satu solusi dalam hal ini yaitu seluruh pelaku usaha harus terkait dengan perbankan sehingga mendapatkan bunga dan masalah yang sama sehingga profit tetap dapat diperoleh tanpa memikirkan persaingan pasar dengan cara menaikkan harga barang, yang akhirnya akan menimbulkan inflasi. Dan inflasi tidak akan berpengaruh pada masyarakat jika pendapatan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah pegawai

(baik sektor formal dan informal) dinaikan. Namun disinilah titik buntu dari permasalahan tersebut, akibat dari sistem yang lebih mengarah pada kapitalis maka yang cenderung diinginkan oleh para pelaku usaha kapitalis adalah profit maksimum sehingga hal tersebut menjadi sulit terjadi dan permasalahan yang timbul pun menjadi buntu dalam hal penyelesaian.

Selain itu didalam sistem ekonomi yang secara de facto dilaksanakan di Indonesia sekarang menyebabkan terjadinya ketimpangan pada masyarakat Indonesia, baik itu ketimpangan pendapatan, kesejahteraan dan pendidikan serta kesehatan. Hal ini dikarenakan dengan sistem yang ada memungkinkan seluruh keuntungan hanya bertumpu pada segelintir orang saja sehingga pemerataan tidak akan terealisasi.

Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih mengedepankan pasar sebagai paradigmanya. Orientasi pasar pada ekonomi konvensional sejalan dengan pondasi mata air yang menjadikan kelimpahan materi sebagai parameter. Ini adalah alasan utama mengapa kecenderungan pelaku pasar pada sistem konvensional begitu konsumtif, hedonis, materialistis dan individualistis. Dalam ekonomi Islam motif dalam kegiatan ekonomi adalah ibadah. Motif ibadah yang kemudian mempengaruhi semua keutamaan konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya. Secara spesifik ada tiga motif utama dalam mendahulukan ekonomi Islam, yaitu *mashlahah* (kepentingan umum), kebutuhan dan kewajiban (*obligation*). (Fasa, 2017).

C. Problematika System Ekonomi di Indonesia

Pada sisi yang lain, Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sejak lama sudah mencoba menerapkan sendiri ekonomi Syariah/islam (sistem ekonomi campuran) dalam praktek-praktek pembangunan ekonominya. Sistem ekonomi campuran memberikan kebebasan terbatas kepada masyarakatnya dalam menguasai barang-barang modal. (Rahardjo, 2009) Hal ini tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kegiatan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak akan diserahkan kepada swasta melainkan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah.

Dalam hal ini ada pembatasan dalam pemilikan barang modal di Indonesia. Tidak bebas sebebaskan-bebasnya seperti yang diterapkan di negara-negara kapitalis. Konsep intervensi Negara yang begitu jauh dalam mengatur masyarakatnya dalam hal kepemilikan, jika tidak hati-hati cenderung mengarahkan pada pemikiran bahwa sistem ekonomi sosialis yang banyak dianut oleh negara-negara komunis lebih baik dibandingkan

dengan sistem ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia saat ini. Di dalam ekonomi Islam sendiri selagi tidak bertentangan dengan syari'at kepemilikan modal bukanlah hal yang dilarang.

Pendapatan yang kita dapat, memiliki fungsi sosial yang kental dalam Islam. Pemanafaatannya harus dilakukan secara adil, dan sesuai dengan syariah, sehingga selaimen dapatkan keuntungan materiil, kita dapat merasakan kepuasan spiritual. (heni, 2020)

Sistem ekonomi kerakyatan yang banyak diperjuangkan oleh para pemikir ekonomi di Indonesia selama ini, dapat menjawab kegundahan yang melanda dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam konsep ini, individu tidak dilarang dalam memiliki barang-barang modal sama sekali, namun negara dalam hal ini mengarahkan pembagian kepemilikan tersebut kepada masyarakatmasyarakat yang selama ini bergerak di sektorsektor informal dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkat yang diharapkan sekaligus ketimpangan distribusi pendapatan perlahan-lahan dapat diperkecil. Namun, konsep ini banyak disalahartikan ketika berada pada tataran praktek sehingga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh negara ini. Ketika bicara tentang kemiskinan kita sering terjebak pada pemikiran bahwa permasalahan kemiskinan hanyalah masalah ketimpangan ekonomis seperti contohnya pemenuhan kebutuhan pokok saja. Selain ketimpangan ekonomis tersebut masih ada lagi ketimpangan kekuasaan, prestise, status, jenis kelamin, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih dan sebagainya, yang kesemuanya erat kaitannya dengan komponen fundamental dari hakikat konsep pembangunan, yakni upaya menegakkan harga diri dan kebebasan memilih. Jadi walaupun kebutuhan pokok masyarakat secara ekonomis sudah terpenuhi dengan baik, namun ketimpangan non-ekonomis seperti yang disebutkan di atas masih belum terpenuhi, apakah sudah bisa dikatakan rakyat tersebut sudah sejahtera (tidak miskin)?

Jadi permasalahan kemiskinan bukanlah sebuah permasalahan sederhana dalam tataran pemenuhan kebutuhan ekonomis saja, namun merupakan sebuah masalah kompleks yang melibatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan nonekonomis lainnya. Masalah kompleks ini tidak akan selesai dengan sendirinya jika cuma dipecahkan dengan sistem ekonomi Islam.

Masalah utamanya di sini bukan pada konsep dan sistem yang berjalan tapi lebih kepada praktek dan komitmen dari orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Selagi komitmen itu ada, nilai-nilai ketuhanan Yang maha Esa – dalam ekonomi Pancasila pada dasarnya sejalan dengan konsep-konsep sistem ekonomi islam dan sejalan pula dengan sistem ekonomi kerakyatan. Apapun sebutan sistem ekonominya ketiga sebutan sistem tersebut telah mengedepankan nilai-nilai moral sebagai pilar utama. Nilai-nilai moral yang tumbuh dan berkembang dari sanubari Insan Indonesia sebagai ciptaan yang maha Kuasa, yang memiliki kewajiban untuk saling mensejahterakan.

E. CONCLUSION

A. Kesimpulan

Sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyatan, maupun akhir-akhir ini berkembangnya sistem ekonomi syariah telah memperkaya khasanah pemikiran teoritis konsep yang paling tidak mendekati dan sesuai dengan masyarakat Indonesia. Mengembalikan kedaulatan rakyat merupakan alternative yang harus dijalankan untuk mengganti daulat pasar yang berlebihan. Pilar utama dengan banyaknya tindakan yang tak sesuai dengan kaidah etika ekonomi adalah bagaimana menegakkan sisi ketuhanan pada semua pelaku ekonomi.

Menyusun konsep ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai dasar yang menjadi semangat bangsa ini pada waktu memerdekakan diri merupakan landasan kuat menuju system ekonomi yang kita cita-citakan. Konsep tersebut selain harus menjamin arah terwujudnya berbagai cita-cita itu, juga harus dapat menjawab dua tantangan besar yang dewasa ini berada di hadapan kita, yaitu memenangkan persaingan dalam era globalisasi dan membangun segenap potensi yang ada, dengan perhatian pada upaya memberdayakan masyarakat yang ekonominya tertinggal, sehingga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan ekonomi nasional.

Pilihan akan sistem ekonomi yang pas bagi Indonesia menuntut dilakukannya kajian mendalam mengenai struktur pengambilan keputusan, mekanisme informasi dan koordinasi ditentukan oleh pasar ataukah perencanaan, bagaimana hak-hak milik diatur, dan sistem insentif. Selain itu, dalam perbandingan sistem ekonomi diperlukan kajian mengenai hasil akhir dari system ekonomi yang kita anut, yang meliputi: pertumbuhan

ekonomi, efisiensi, distribusi pendapatan, dan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghofur, R. (2010). Sistem Ekonomi antara Kebijakan dan Tujuan. *ASAS*, 2(1).
- Fasa, M. I. (2017). Islamizing The System of Economy: Solution Toward An Economical Welfare For The Islamic Landscape. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–23.
- Ghofur, R. A. (2016). Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat. *Ikonomika*, 1(1), 27–39.
- Mubyarto, M. (2004). Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 19(1).
- NAZERI, N. (2016). Melihat Sistem Perekonomian Indonesia dengan Perspektif Islam. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(1), 97–106.
- Rahardjo, M. D. (2009). Menuju sistem perekonomian Indonesia. *Unisia*, 32(72).
- Supratikno, H. (2021). *Globalisasi, Ekonomi Konstitusi, dan Nobel Ekonomi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Supriyanto, S. (2009). Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 6(2), 17211.